

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

2020

PERBUP SUKOHARJO NO 27 TAHUN 2020, BD 27, KABUPATEN SUKOHARJO: 15 HLM

PERBUP SUKOHARJO TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

ABSTRAK:

- bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan besaran penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan ketentuan mengenai alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa perlu diganti
- Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No 13 Tahun 1950;UU No 28 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011 j.o UU No 15 Tahun 2019; UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 j.o UU No 9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 j.o PP No 11 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014;Permendagri No 80 Tahun 2015 j.o Permendagri No 120 Tahun 2018;Perda Kab Sukoharjo No 10 Tahun 2010;Perda Kab Sukoharjo No 7 Tahun 2011 j.o Perda Kab Sukoharjo No 11 Tahun 2017; Perda Kab Sukoharjo No 13 Tahun 2011 j.o Perda Kab Sukoharjo No 12 Tahun 2017; Perda Kab Sukoharjo No 12 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Sebagian Hasilnya Diberikan Kepada Desa
  4. Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian
  5. Pengelolaan dan Penyaluran
  6. Pencairan DBHPRD
  7. Kurang Salur Dan/Atau Lebih Salur DBHPRD
  8. Penggunaan
  9. Pertanggungjawaban
  10. Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan bupati ini ditetapkan di kabupaten sukoharjo, tanggal 22 Mei 2020
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Mei 2020